

III. PENGUATAN SISTEM PANGAN LOKAL

Purwiyatno Hariyadi

Direktur Southeast Asian Food & Agricultural Science and Technology (SEAFAST) Center, LPPM, IPB dan Dosen Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fateta, IPB.

Tiap tahun, zonder ketjuali, zoner pauze, zonder ampun, soal beras ini akan datang, -- dan akan datang crescendo—makin lama makin hebat—makin lama makin sengit—makin lama makin ngeri—selama tambahnya penduduk yang tjepat itu tidak kita imbangi dengan tambahnya persediaan bahan makanan yang cepat pula!

(Presiden RI Pertama; Ir. Sukarno, Almanak Pertanian, 1953, hal 11- 20)

Pangan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia. Karena itulah, maka industri pangan selalu tumbuh dan berkembang secara alami di suatu negara dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok bagi populasi yang selalu tumbuh. Indonesia, sebagai negara tropis yang kaya akan sumber daya hayati, tentunya sangat berpotensi untuk mengembangkan aneka pangan yang unik dan khas. Kondisi keanekaragaman ini tentunya sangat berpotensi berkontribusi pada ketahanan pangan nasional.

Menurut Dewan Ketahanan Pangan; ketahanan pangan dididfinisikan sebagai suatu kondisi terpenuhinya pangan di tingkat rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik dalam jumlah mutunya, aman, merata dan terjangkau. Dengan demikian, terdapat 4 aspek katahanan pangan yang utama; yaitu (i) aspek ketersediaan pangan (*food availibity*), (ii) aspek stabilitas ketersediaan/pasokan (*stability od supplies*), (iii) aspek keterjangkauan (*access to supplies*), dan aspek konsumsi (*food utilization*).

Secara lebih mendasar, kondisi dan pemenuhan aspek-aspek ketahanan pangan tersebut sangat dipengaruhi oleh komitmen pemerintah; yang dinyatakan sebagai suatu komitmen sosial, budaya, politik, dan ekonomi nasionalnya. Dengan kata lain, sistim sosial politik dan ekonomi suatu negara; akan sangat mewarnai kondisi ketahanan pangan nasionalnya pula. Karena pentingnya faktor struktur sosial, budaya, politik dan ekonomi ini dalam menentukan ketahanan pangan, maka dalam kerangka kerja konseptual ketahanan pangan, faktor-faktor tersebut disebut sebagai faktor determinan dasar (*basic determinant*) bagi ketahanan pangan.

Sebagai *basic determinant*, maka sistim dan struktur sosial, budaya, politik dan ekonomi yang cocok tentunya sangat ditentukan dengan kondisi sumberdaya yang ada; baik dari sudut lingkungan (termasuk lingkungan alam, lingkungan sosial, dan budaya), teknologi (termasuk kebiasaan dan praktek-praktek keseharian lainnya), dan sumberdaya manusianya. Dengan kata lain, sistim dan struktur sosial, budaya, politik dan ekonomi perlu dikembangkan dan disesuaikan dengan sumberdaya lokal (indigenus) yang spesifik. Sumberdaya lokal (*indigenous resources*) diberi batasan sebagai "*set of **knowledge and technology** existing and developed in, around and by specific indigenous **communities (people)** in an specific **area (environment)***".

Jika kerangka kerja konseptual ketahanan pangan tersebut dikaji secara lebih mendalam, maka baik *underlying determinants* maupun *immediate determinants* ketahanan pangan; terutama yang mencakup ketersediaan pangan dan kebiasaan makan, juga sangat dipengaruhi oleh kondisi indigenus suatu masyarakat. Dalam hubungannya dengan ketersediaan pangan –misalnya- maka upaya yang sering dilakukan adalah peningkatan produksi, minimisasi kehilangan pasca panen, peningkatan keamanan pangan, peningkatan nilai gizi, atau pemasukan bahan pangan melalui "import"; baik dari luar daerah atau bahkan dari luar negeri. Keberhasilan upaya-upaya tersebut juga sangat tergantung pada kondisi indigenus yang melingkupinya.

Terlihat bahwa peranan teknologi sangat diperlukan upaya-upaya peningkatan ketersediaan pangan tersebut. Salah satu teknologi yang memegang peranan penting adalah teknologi pangan. Teknologi

pangan; terutama teknologi penanganan bahan hasil pertanian, teknologi penyimpanan, teknologi pengolahan, teknologi pengemasan pangan, teknologi distribusi pangan, dan lain sebagainya mempunyai peran penting dalam menekan kehilangan, meningkatkan keanekaragaman pangan, meningkatkan keamanan pangan, dan meningkatkan nilai gizi pangan.

Untuk bisa memberikan apresiasi mengenai betapa pentingnya peranan teknologi pangan, seseorang perlu memahami ciri-ciri produk pangan hasil pertanian. Umumnya produk-produk hasil pertanian bersifat musiman, mempunyai mutu beragam, mudah rusak (*food perishability*), dan mempunyai kekhasan lokal (spesifik lokasi). Karena itu diperlukan penanganan yang sesuai dengan jenis produk dan karakteristik khas yang sesuai, dan untuk itu diperlukan pengetahuan teknologi pangan yang sesuai pula.

Penggalian, pemahaman, penguasaan dan pengembangan pengetahuan dan teknologi pangan yang sesuai ini memerlukan pemahaman mengenai pengetahuan indigenus yang dimiliki masyarakat setempat. Pendekatan ini mempunyai nilai strategis dalam pengembangan produk pangan, karena ada keterkaitan yang erat antara *knowledge, technology, people, dan environment*, sehingga pada akhirnya tidak terlalu sulit untuk mengintroduksi produk pangan "baru" hasil proses pengembangan. Produk pangan yang dikembangkan dengan basis potensi lokal biasanya mempunyai tingkat kesesuaian yang baik dengan preferensi konsumen, dan berpotensi untuk menjadi unggulan ciri khas daerah/lokal.

Berbasis Potensi Lokal

Indonesia, perlu memanfaatkan momentum otonomi daerah untuk membangun kemandirian pangan nasional ini. Dengan memperhatikan potensi yang dipunyai Indonesia; khususnya mengenai keadaan, luas wilayah dan kondisi lingkungannya, maka Indonesia mempunyai peluang besar untuk mewujudkan kemandirian pangannya. Pemerintah daerah perlu kembali mengevaluasi; apakah beras merupakan pangan pokok yang tepat bagi daerahnya. Pemerintah daerah perlu secara serius menggali potensi lokalnya dalam hal pangan pokok; yang lebih sesuai dengan lingkungan alam dan lingkungan budayanya.

Ilustrasi mengenai otonomi daerah dan pengembangan potensi idigenus ini bisa diperoleh di berbagai negara bagian di Amerika Serikat. Di Negara Bagian Idaho, Amerika Serikat, komitmen pemerintah ini secara nyata terpampang gagah pada pelat nomor mobil; *Idaho, Famous Potatoes*. Demikian di Negara Bagian Wisconsin, juga di pelat mobil- terdapat komitmen untuk membangun ketahanan dan "kemandirian" pangan berbasis pada susu dan produk-produk susu"; *Wisconsin America's Dairyland*. Negara bagian Georgia AS juga dengan bangga menyatakan dirinya sebagai *peach state*. Ilustrasi ini memperlihatkan betapa tingginya komitmen politik pemerintah (dalam hal ini pemerintah negara bagian) di AS untuk secara konsisten dan sustainable, membangun "kemandirian" pangan berbasis pada potensi (sumber daya alam, manusia, teknologi dan budaya) indigenus atau lokal yang dimilikinya.

Dalam hal ini; konsep penganeekaragaman pangan harus diartikan sebagai penganeekaragaman secara horizontal; penganeekaragaman secara vertikal, dan penganeekaragaman secara regional. Artinya; masing-masing daerah, sesuai dengan otonomi dan kemandirian daerah dalam mengelola wilayahnya masing-masing, perlu mengupayakan kemandirian pangan daerah sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Program ini kemudian perlu ditegaskan dengan komitmen politik pemerintah daerah yang didukung secara politis pula oleh pemerintah pusat.

Diketahui bahwa propinsi Gorontalo –misalnya- terkenal dengan jagungnya. Namun demikian, pangan pokoknya toh tetap beras. Propinsi Papua mempunyai tradisi dan potensi sagu sebagai bahan pangan pokok, namun saat ini pun tergantung pada beras. Jadi, terlihat bahwa perlu ada reorientasi pembangunan pangan daerah secara mendasar. Siapa tahu dalam waktu yang dekat kita akan melihat pelat nomor mobil di Malang Jatim akan membangun kemandirian pangan berbasis pada apel dan dengan bangga menyatakan dirinya sebagai kota Apel. Demikian juga dengan Beras di Cianjur dan Karawang, Dodol di Garut, Jenang di Kudus, Sagu di Ambon dan Papua, Jagung di Gorontalo dan Madura, Talas di Bogor, dan lain sebagainya.

Dengan demikian, otonomi daerah perlu dimanfaatkan sebagai suatu momentum untuk membangun ketahanan pangan. Untuk itu, pemerintah daerah perlu secara cermat melakukan identifikasi potensi indigenus unggulan daerah dengan memperhatikan sumber daya potensialnya (*environment, technology, people* dan *socio-Cultural Environment*) kedalam sistem dan struktur ekonomi daerahnya. Hal ini perlu secara tegas sebagai komitmen pemerintah daerah (*political and economic structure*).

Teknologi Pangan dan Nilai Tambah

Salah satu peranan penting teknologi pangan adalah dalam pengembangan program lama "penganekaragaman pangan". Menurut hemat penulis, program lama penganekaragaman pangan belum pernah secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan dilakukan secara konsisten oleh pemerintah. Karena itu, sekarang inilah saatnya untuk betul-betul melaksanakan dan merevitalisasi program penganekaragaman pangan. Untuk itu, diperlukan adanya komitmen yang kuat dan jelas dari pemerintah mengenai program penganekaragaman ini; sehingga pada akhirnya akan terciptanya suatu lingkungan sosial masyarakat yang kondusif dan bereaksi positif pada program penganekaragaman tersebut.

Dengan komitmen dan dukungan yang kuat, ternyata pemerintah "telah" pernah berhasil memperkenalkan produk pangan baru; –bahkan termasuk memperkenalkan budaya makan baru- yaitu *produk* mi instan. Sayangnya; pemilihan produk yang dikembangkan –yaitu produk berbasis gandum- tidak mengakar pada pertanian kita. Dengan komitmen yang kuat, maka pemerintah hendaknya bisa mengembangkan model "mi instan" untuk program penganekaragaman pangan –tentunya pangan yang berbasis pada sumber daya indigenus lokal. Salah satu komitmen penting pemerintah yang diperlukan adalah komitmen untuk memanfaatkan sumberdaya indigenus dan tidak dengan mudah melakukan impor.

Secara khusus, teknologi pangan perlu berperan dalam pengembangan pengindustrian penganekaragaman pangan, tentunya berbasis sumber daya lokal. Untuk itu, perlu dilakukan beberapa hal; antara lain (i) upaya eksplorasi & pemanfaatan potensi bahan lokal unggul, (ii)

perbaikan dan aplikasi teknologi budidaya, pengolahan, pengemasan, dan (iii) pengaplikasian konsep pengindustrian pangan.

Pengindustrian keanekaragaman pangan perlu dilakukan dengan mengkreasikan nilai tambah, sedemikian rupa sehingga produk pangan lokal yang diproduksi tersebut mempunyai nilai lebih daripada, atau paling tidak sama, dengan produk pangan pokok beras (dan gandum?) yang saat ini mendominasi menu nasional Indonesia.

Penciptaan nilai tambah ini merupakan salah satu tantangan yang harus dipecahkan oleh teknologi pangan. Untuk itu, upaya penelitian di bidang ilmu dan teknologi pangan untuk mengeksplorasi keunggulan/fungsional pangan lokal, dan mengidentifikasi dan memetakan kesukaan dan kebiasaan konsumen perlu dilakukan secara intensif.

Penutup

Terlihat bahwa teknologi pangan mempunyai peran strategis dalam upaya penciptaan ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal. Khususnya, melalui pengembangan industri penghasil nilai tambah, dalam hal ini industri aneka ragam pangan, berbasis potensi lokal. Upaya ini merupakan pekerjaan besar yang memerlukan kemitraan antar berbagai pihak pemangku kepentingan. Karena itu, industri penghasil nilai tambah berbasiskan pada sumber daya indigenus di suatu daerah dengan perlu dilakukan dengan melibatkan semua stakeholder lokal/indigenus pula, meliputi antara lain pemda (atau pemda-pemda), lembaga penelitian, industri, perguruan tinggi, LSM, dan masyarakat.